

**BAB III**  
**LATAR BELAKANG PENDIDIKAN MOHAMMAD**  
**NATSIR SEBAGAI TOKOH INTELEKTUAL**

**3.1 Latar Belakang Pendidikan Mohammad Natsir**

Perjuangan pendidikan awal Mohammad Natsir dimulai pada 1916 tepatnya saat usia 8 tahun, dimulai di Sekolah Rakyat Maninjau selama dua tahun hingga kelas dua, Kemudian Mohammad Natsir mulai sekolah di (HIS) Adabiyah Padang dibawah pimpinan H. Abdullah Ahmad. Tidak begitu lama Mohammad Natsir sekolah di HIS Abadiyah Padang, hanya beberapa bulan saja Mohammad Natsir harus pindah sekolah ke HIS pemerintah di Solok yang baru dibuka. Pada saat di Solok itulah Mohammad Natsir mulai belajar Agama Islam.

Menamatkan HIS di Padang pada 1923 Mohammad Natsir mendapatkan nilai yang sangat baik, setelah mendapatkan nilai yang baik itu Mohammad Natsir semakin bersemangat dalam mencari ilmu, khususnya melanjutkan pendidikannya. Mohammad Natsir meneruskan pendidikannya ke MULO di Padang pada tahun 1923. Karena prestasinya, Mohammad Natsir remaja dapat sekolah MULO gratis serta memperoleh beasiswa dari pemerintahan Belanda sebesar dua puluh rupiah setiap bulannya.

Ketika di usia 19 tahun Mohammad Natsir meneruskan studinya ke AMS di Bandung. Motivasi Mohammad Natsir dalam meneruskan sekolah

ke AMS, didorong oleh cita-citanya yaitu sebagai seorang sarjana di bidang hukum atau *Meester in de Rechten* (Mr).<sup>19</sup>

Pendidikannya di AMS dibiayai oleh Pemerintahan Belanda setiap bulannya mendapat beasiswa 30 *Gulden* sampai selesainya study di AMS. Karena kepribadian yang dimiliki Mohammad Natsir sangat baik, ramah, Saat belajar di AMS, Mohammad Natsir mulai berperan sebagai anggota JIB cabang Bandung sampai terpilih menjadi ketuanya sejak 1928 sampai 1932.<sup>20</sup>

Semenjak bergabung di JIB, Mohammad Natsir mulai aktif hingga memiliki banyak teman, tokoh politik hingga menemukan guru agama yang sekaligus memotivai kepribadian termasuk keagamaan Mohammad Natsir sehingga sampai menjadi tokoh intelektual. Diantara teman seperjuangan Mohammad Natsir adalah Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Prawoto Mangkusasmito, Mr. Mohammad Roem dan masih banyak teman yang lainnya. Kemudian ada beberapa tokoh gerakan politik yang bertemu dengan Mohammad Natsir waktu di JIB antara lain Haji Agus Salim, H.O.S. Tjokroaminoto, dan Syaikh Ahmad Syurkati. Guru Agama Mohammad Natsir yaitu Ahmad Hassan tokoh utama organisasi Persatuan Islam yang membimbing dirinya melakukan studi tentang Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Lukman Hakiem, *Biografi Mohammad Natsir: Kepribadian, Pemikiran, & Perjuangan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019, hlm 13

<sup>20</sup> Dzulfikriddin, *op.cit.*, hlm 20

<sup>21</sup> Damanhuri Zuhri, "Mohammad Natsir: Pendidik-Pejuang yang Istiqomah", dalam Dzulfikriddin, *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia : Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indoneisa*, Bandung: Mizan Pustaka, 2010. hlm 21

Pendidikan AMS diselesaikan Mohammad Natsir pada tahun 1930 saat usianya 22 tahun.

Perjuangan pendidikan yang dihadapi Mohammad Natsir dari awal usia 8 tahun sampai selesainya sekolah di AMS pada 1930 telah membuahkan hasil yang banyak mempengaruhi alam pikiran intelektual dan keagamaan Mohammad Natsir. Sejak saat itu, Mohammad Natsir memiliki peluang emas untuk melanjutkan Pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan adanya beasiswa oleh pemerintah Belanda, yaitu ke *Rechts Hogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta atau ke *Handels Hogeschool* (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam.

Prinsip dan kepribadian yang dimiliki Mohammad Natsir terhadap pengembangan Pendidikan Islam itu sangatlah kuat karena terdapat satu cita-cita luhur. Kemudian berguru pada Guru-Guru terbaik, diantaranya ada tiga guru utama yaitu Ulama Persatuan Islam Ustadz A. Hassan, KH. Agus Salim, dan Syaikh Ahmad Soerkati.

Perjuangan Mohammad Natsir dalam menempuh Pendidikan sangatlah memberikan pelajaran dan hikmah untuk generasi setelahnya. Dimana ada tiga ciri pemikiran Pendidikan Mohammad Natsir yaitu berbasis tauhid, Integralistik dan Komprehensif.

### 3.2 Latar Belakang Politik Mohammad Natsir

Begitu banyak kiprah Mohammad Natsir dalam ruang lingkup Pendidikan yang telah menorehkan pemikiran dan perjuangannya pada bangsa ini. Selanjutnya kiprah Mohammad Natsir dalam Latar Belakang politik yang tentunya banyak memengaruhi kehidupan Mohammad Natsir. Diawali atas permintaan oleh Sabirin sebagai ketua PSI cabang Bandung kepada Mohammad Natsir untuk menjadi anggota Partai Setikat Islam maka semenjak itulah awal Mohammad Natsir mulai bergabung dalam dunia politik yaitu sekitar tahun 1930.<sup>22</sup>

Mohammad Natsir merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia, yang pernah menduduki dua jabatan penting, yaitu sebagai menteri penerangan dalam Kabinet Syahrir dan perdana menteri pertama pada masa pemerintahan Soekarno. Sebagai politisi, beliau pernah menduduki jabatan puncak partai Islam terbesar, yaitu Masyumi, dan menjadi ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.<sup>23</sup>

Seorang demokrat sejati, kata Mohammad Natsir suatu ketika, haruslah senantiasa sadar untuk mempersiapkan pengganti-penggantinya, yakni generasi penerus yang akan meneruskan estafet perjuangan. Namun kemunculan pemimpin, menurutnya, tidak dapat dikondisikan apalagi dikontrol dan didongkrak. Pemimpin, menurut Mohammad Natsir, harus lahir dari bawah. Ia lahir karena masyarakat dan kelompoknya menganggap orang itu layak dan pantas menjadi pemimpin.

---

<sup>22</sup> Memoar, *Senarai Kiprah Sejarah*, Buku Kedua, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993, hlm. 85

<sup>23</sup> Thohir Luth. *M. Natsir Dakwah Dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani, 1999, hlm. 9

Pandangan seperti di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dipegang oleh seseorang, bagi Mohammad Natsir tidak lain adalah amanat dari orang banyak. Sebagai amanat tentulah merupakan kewajiban untuk menunaikannya. Kalau kepemimpinan dilihat sebagai amanat, implikasi selanjutnya adalah, seorang pemimpin tadi wajib memegang teguh etika kepemimpinan, yang tentu saja sifatnya universal. Prinsip kejujuran, tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia harus dipegang teguh. Pemimpin tak perlu malu-malu mengakui kelemahan dan kekurangannya, dan harus senantiasa bersedia menerima kritik dan masukan dari orang lain.

Perjuangan politik, kata Mohammad Natsir, orang harus pandai-pandai menimbang-nimbang sesuatu. Selain ada prinsip yang harus dipegang teguh, terdapat pula ruang untuk berkompromi atas dasar saling memberi dan menerima. Keanekaragaman dalam masyarakat, katanya adalah *sunnatullah* yang tidak dapat dihapuskan. Keanekaragaman dan kemajemukan itu, baik di segi etnik, agama maupun aliran politik, tidaklah menjadi halangan untuk membangun kerjasama yang harmonis atas dasar kepentingan bersama. Masyarakat yang majemuk, menurut Mohammad Natsir, memerlukan adanya titik temu bersama yang dapat dijadikan dasar kesetiaan dalam penyelenggaraan kehidupan bersama di antara kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang berbeda-beda.

Bagi Mohammad Natsir, politik namanya adalah sebuah seni yang memerlukan kehalusan dan keindahan tersendiri. Dalam memperjuangkan

sesuatu, katanya suatu ketika di tahun 1950, "kita harus mencapai sasaran tanpa lawan-lawan merasa terkalahkan". Mohammad Natsir mencoba menerapkan pandangannya ini ketika ia berusaha keras untuk menggoalkan mosi integral yang diracangnya di DPR, sebagai upa ya yang dianggapnya paling baik untuk membubarkan *Republik Indonesia Serikat* (RIS) dan membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usaha Mohammad Natsir untuk menengahi kelompok Republikan dengan kelompok Federalis pada waktu itu memang berhasil dengan gemilang. Mosi yang diracangnya mendapat dukungan dari kelompok paling kanan hingga kelompok paling kiri, dengan kesediaan Ir. Sakirman - seorang tokoh PKI - untuk turut serta menandatangani mosi. Mosi tersebut populer dengan istilah Mosi Integral Mohammad Natsir. Mosi Integral Natsir adalah pernyataan yang ditujukan sebagai langkah awal bagi tumbuhnya *integrative revolution* bagi bangsa ini. Sebuah solusi politik penyatuan berbagai permasalahan, baik etnik-kedaerahan maupun ideologi dan keyakinan-agama.<sup>24</sup>

Mosi integral akhirnya diterima secara utuh oleh DPR, dan atas dasar itulah Perdana Menteri Hatta mengadakan perundingan antara Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT) untuk secara bersama-sama melebur diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan akhirnya terbentuk lagi secara resmi

---

<sup>24</sup> Pepen Irpan Fauzan. *Mohamad Natsir: Dari PERSIS, Masyumi, Hingga Mosi Integral NKRI*. STAI Persatuan Islam Garut. 2019, hlm 11

pada tanggal 17 Agustus 1950, tanpa ada pihak-pihak yang merasa terkalahkan. Untuk mampu melaksanakan pandangan Mohammad Natsir di bidang strategi di atas itu, tentu para politikus harus memiliki kemampuan kecanggihan berpikir, kedewasaan berpolitik dan ketepatan membaca situasi medan.

Faktor kemampuan melakukan lobi dan diplomasi untuk meyakinkan pihak-pihak lain dibutuhkan. Tentu semuanya harus didasarkan kepada i'tikad baik dan kejujuran demi kemaslahatan bersama, bukan demi kepentingan golongan sendiri. Mohammad Natsir sendiri memang menganut keyakinan bahwa politik haruslah ditundukkan kepada etika yang tinggi. Dengan cara itu, keinginan untuk berkuasa sendiri dan menghabisi orang-orang yang tak sepaham dengan menghalalkan segala cara harus dihindari jauh-jauh.

Perjuangan yang panjang dan keterampilan wawasan politiknya mengantarkan Mohammad Natsir tidak hanya milik Indonesia, melainkan telah menjadi milik dunia, khususnya dunia Islam. Ia sangat dicintai oleh pemimpin dunia, terutama negara-negara mayoritas Muslim karena keterampilan dan kejujurannya dalam dunia diplomasi Internasional.

Terlepas dari itu, Mohammad Natsir dan kawan-kawannya bersama Masyumi telah menanamkan sendi demokrasi dalam pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerinduan kita pada Mohammad Natsir dan pemimpin Masyumi adalah kerinduan pada pemimpin yang patut diteladani, berpikir jernih dan bertindak lurus. Kini kita sedang kesulitan mencari

pemimpin yang layak menjadi cermin hidup kita. Masyumi adalah simbol perjuangan, oleh sebab itu menghidupkan kembali Masyumi dalam bentuk apa pun namanya, bukan jalan keluar yang jitu.

Mohammad Natsir mengibaratkan dirinya bagai seekor ikan yang dipesankan kepada setiap generasi. Sebagaimana seekor ikan di laut, ia tidak pernah terpengaruh oleh rasa asin ke tubuhnya. Ketidak pengaruhan ini patut dimiliki oleh umat yang berwujud dalam suatu kepribadian yang kukuh di tengah dinamika kehidupan yang berubah dengan cepat.

Perjalanan selanjutnya, Mohammad Natsir dan Soekarno makin sering bersilang pendapat. Sementara Soekarno semakin perkasa di puncak kekuasaan dan akrab dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), Mohammad Natsir menjaga jarak dengan Soekarno dan kian menyisih sambil tetap memimpin fraksi Masyumi di Parlemen 1950-1958. Di samping menjadi anggota Konstituante 1956-1958. Perselisihan memuncak ketika Soekarno secara sepihak menguburkan semua partai di bawah timbunan Demokrasi Terpimpin.

Berada di bawah rongrongan PKI, Mohammad Natsir dan keluarga berpindah ke Sungai Dareh, Padang bergabung bersama para serdadu yang membelot. Dari pedalaman Sumatera Barat, Mohammad Natsir dan Sjafrudin Prawiranegara ingin menekan Soekarno agar kembali ke konstitusional. Demokrasi harus dipulihkan. Negara dan bangsa harus diselamatkan.



Pada 17 Agustus 1959, Soekarno secara sepihak membubarkan Masyumi dan memaklumkan pengampunan pada Mohammad Natsir dan kawan-kawan. Tiba di Jakarta, Mohammad Natsir dan Sjafruddin serta kawan-kawan lainnya ditangkap atas tuduhan terlibat Pemberontakan Rakyat Republik Indonesia (PRRI) Permesta.

Mohammad Natsir diasingkan dengan menjalani karantina politik di Batu Malang, Jatim, 1960-1962 dan menjadi tahanan politik di Rumah Tahanan Militer (RTM) Keagungan Jakarta, 1962-1966. Hingga akhirnya, pada tahun Juli 1966 Mohammad Natsir dibebaskan tanpa melalui proses pengadilan. Sementara di luar, keadaan telah berubah, kemudi kekuasaan politik telah berganti. Harapan Mohammad Natsir menghidupkan kembali Masyumi tidak terwujud. Mohammad Natsir kemudian memasuki lahan baru dengan mengembangkan diri di medan Dakwah. Pada tahun 1967, Mohammad Natsir bersama Ulama dan Zuama mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Jakarta.

Memang tak diijinkan pergi ke luar negeri. Meskipun hal itu teramat penting bagi dirinya dan umat Islam di tanah air. Keterbatasan ruang gerak, tak menghalangi Mohammad Natsir berbuat amal. Tidak hanya ratusan mubalig dan dai yang tersebar luas di pelosok tanah air, melainkan Perhatian Mohammad Natsir terhadap generasi muda yang cukup besar, khususnya Mahasiswa. Karena menurut beliau, generasi muda merupakan sumber daya manusia yang potensial. Ini dibuktikannya dengan

pembangunan masjid di kampus-kampus di universitas terkemuka di tanah air.

Ada peran politik istimewa Mohammad Natsir di era awal RIS (Januari-Februari 1950), yaitu sebagai salah satu perumus lambang Negara (Garuda Pancasila). Tidak banyak yang tahu, bahwa Lambang Negara Garuda Pancasila dirumuskan salah satunya oleh Mohammad Natsir. Pada Sidang Kabinet RIS Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Sultan Hamid II. Bertindak sebagai ketua: Muhamad Yamin, dan yang tergabung kedalam anggota antara lain: Ki Hajar Dewantoro, M.A Pellaupessy, Mohammad Natsir, R.M Ng Purbatjaraka. Panitia bertugas untuk menyeleksi semua usulan-usulan mengenai lambang negara, kemudian diusulkan kepada Presiden Soekarno.<sup>25</sup>

Mohammad Natsir mempunyai jasa terhadap perumusan symbol (bintang) untuk Sila Pertama Pancasila. Simbol-simbol dalam Perisai Pancasila secara semiotika hukum merupakan perpaduan ide dari usulan anggota Panitia Lambang Negara. Simbol Sila Kesatu sumbangan ide dari Mohammad Natsir, simbol Sila Kedua ide dari Sultan Hamid II dan sketsa gambar perisai dan garis khatulistiwa adalah usulan Sultan Hamid II, simbol Sila Ketiga sumbangan ide dari Purbatjaraka, simbol Sila Keempat

---

<sup>25</sup> Pepen Irpan Fauzan, *Mohamad Natsir: Dari Persis, Masyumi, Hingga Mosi Integral NKRI*. dosen STAI Persis Garut dan staf asatidz di Pesantren PERSIS 19 Garut. 2019. hlm 6

sumbangan ide dari Mohammad Yamin, simbol Sila Kelima sumbangan ide dari Ki Hajar Dewantoro.<sup>26</sup>

Kiprah politik Mohammad Natsir mengalami masa masa puncaknya setelah Mohammad Natsir berhasil mengajukan Mosi Integral pada saat sidang pleno parlemen 5 April 1950. Hasil dari Mosi ini berhasil mengembalikan keutuhan bangsa Indonesia dari masa genting yang menimbulkan berbagai konflik ke dalam Negara Kesatuan RI (NKRI) yang sebelumnya berbentuk negara federasi (Republik Indonesia Serikat).<sup>27</sup>

Akhir kiprah politik Mohammad Natsir diwarnai berbagai permasalahan yang tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi yaitu dengan adanya tiga ujian politik Mohammad Natsir, diantaranya Pembubaran Masyumi, dipenjara pasca PRRI dan dicekal pasca Petisi 50. Petisi 50 merupakan sebuah pernyataan berupa kritik terhadap rezim orde baru yang di tanda tangani oleh 50 orang tokoh republic Indonesia, diantaranya Mohammad Natsir, Ali Sadikin, A.H Nasution & Jend. Hoegeng. Namun ada tiga jasa besar Politik Mohammad Natsir yaitu memimpin Partai paling demokratis di Indonesia (Masyumi), Mosi Integral (NKRI) dan Perdana Menteri pertama NKRI dengan sistem *zaken* kabinet.

### **3.3 Latar Belakang Dakwah Mohammad Natsir**

Banyak sekali Latar Belakang dakwah Mohammad Natsir dimulai sejak pertengahan 1930 tepatnya pada usia 22 tahun bersama kawan-kawan

---

<sup>26</sup> Turiman. "Analisis Semiotika Hukum Terhadap Lambang Negara Republik Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Th. 44 No. 3, Juli-September 2014, hlm. 366

<sup>27</sup> Lukman Hakiem, *op.cit.*, hlm xviii

seperjuangannya ketika pada waktu di Partai Masyumi. Perjuangan Mohammad Natsir dalam bidang dakwah cukup lama sampai akhirnya.

Sikapnya yang istiqamah telah menyatu dalam keteladanannya, ia menempuh perjuangan panjang yang disebutnya dengan jejak risalah. Jejak risalah yang ia maksud adalah amanah dakwah yang diembankan kepada manusia terbaik sepanjang zaman, Muhammad Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam*, dalam rangka menghidupkan dan menyempurnakan manusia sehingga benar-benar hidup.<sup>28</sup>

Setelah didirikannya Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia pada 27 Februari 1967 kemudian dengan keluarnya Akte Notaris Nomor 4/Tanggal 9 Mei 1967 menyatakan bahwa Mohammad Natsir disetujui sebagai ketua DDII yang pertama.<sup>29</sup>

Pada saat dipercayai sebagai ketua DDII Mohammad Natsir mulai mengemban banyak tugas baik di dalam negeri bahkan sampai ke dunia Internasional terutama dunia Islam. Ketika Mohammad Natsir mulai melakukan kunjungan ke berbagai negara-negara Islam antara lain Iran, Irak, Lebanon, Mesir, Turki, dan Arab Saudi. Maka pada saat itulah Mohammad Natsir mulai banyak permintaan untuk menghadiri konferensi, seminar, dan muktamar.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> M. Natsir. *Agama Negara Dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Media Dakwah. 2001, hlm 229

<sup>29</sup> Lukman Hakiem, *Perjalanan Mencari Keadilan & Persatuan; Biografi Dr. Anwar Harjono, S.H.*, Jakarta:Media Dakwah, 1993, hlm.235-236.

<sup>30</sup> Anwar Harjono, "Pikiran-Pikiran Pak Natsir Mendasar" dalam *Suara Masjid*, Nomor 221, Februari 1993, hlm. 10. Liat juga Dzulfikridin, *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik*

Dalam sebuah buku “Politik Melalui Jalur Da’wah”, Mohammad Natsir mengatakan perkataan yang menguatkan bahwa jangan berhenti da’wah hingga kalimat ini terus selalu di kenang bahkan sampai diucapkan kembali oleh para da’i dari lisan ke lisan, generasi ke generasi, kalimat itu adalah “Dulu berda’wah lewat politik, dan sekarang berpolitik melalui jalur da’wah”.<sup>31</sup>

---

*Indonesia : Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indoneisa*, Bandung: Mizan Pustaka, 2010. Hlm 32

<sup>31</sup> Wildan Hasan, *Menafsir Natsir: Kontektualisasi Pemikiran Mohammad Natsir dalam Wacana dan Gerakan Kontemporer*, Bekasi: Natsir Corner. 2021, Hlm 2